

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik FIS UNP
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Administrasi Publik*



Oleh:

**DIAN PUTRI
TM/NIM : 2007/89005**

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

Terima kasih ku ucapkan kepada semua teman2 ku Ling2, Mia, Uti, Putri, Icha, Santi, Ni Isma, Ayu, Mike, Ija, Leni, Kak Deka, Uri, Tika, Anggi, Wawan, Harry, Aldi, Pino, Awidra, Ariston, Mitcel, Aries, Agung, Wiwil, Sance, Yogi, Sentosa, Pm, frandy, David, Angga, Gemal, Alul, Kak Rina, Gani, Ali, dan seluruh teman2 ku yang tak bisa kusebutkan satu persatu....

Banyak kenangan yang telah terukir, yang terekam indah di memori dan melekat di jiwa serta kujalani semuanya dalam limpahan cinta dan kasih sayang. Semuanya akan terukir dalam memori jiwa yang tersimpan sempurna dan takkan terusik oleh siapapun.

Terima kasih ku ucapkan pada Pembimbingku Bapak Afriva Khaidir, S.H, M, Hum, M.A.P.A, Ph, D dan Ibu Siska Sasmita, S. IP, M.P.A yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga kebaikan Bapak ibu dibalas oleh Allah SWT. Amin..

Terima kasih kepada tim penguji skripsiku

Bapak Dr. H. Helmi Hasan, M.Pd

Ibu Dra. Hj. Maria Montessori, M.Ed, M.Si dan Ibu Dra. Hj. Aina

Yang telah banyak memberikan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Terimakasih kepada PA ku Bapak Drs. Ideal Putra, M. Si yang telah membimbing dan memberi arahan dari awal perkuliahan.

Buat Semua Dosen2 Ku Terima Kasih atas semuanya...

Buat Bu Mimi, Ni Sil n Kak Ara makasih y atas Bantuannya..

Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal bagiku dalam menempuh jalan yang masih panjang untuk mencapai harapan, cita dan cinta.....



Dian Putri, S Ap

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tugas akhir berupa skripsi dengan judul **Implementasi Kebijakan Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Padang** ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah dengan menyebutkan pengarang dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila pada kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, Januari 2012
Yang membuat pernyataan



Dian Putri
TM/NIM, 2007/89005

ABSTRAK

DIAN PUTRI: NIM 2007/89005 Implementasi Kebijakan Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Padang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum maksimalnya pelaksanaan tugas koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan dan kegiatannya masih dilaksanakan secara parsial oleh SKPD di Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) implementasi kebijakan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Padang; 2) mengetahui kendala-kendala dalam implementasi kebijakan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Padang; dan 3) mengetahui upaya mengatasi kendala dalam implementasi kebijakan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Padang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian ditentukan dengan cara *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis yang dipakai adalah analisis kualitatif. Sedangkan uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi dan data dianalisis dengan langkah sebagai berikut pengumpulan data, reduksi data, klasifikasi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan/ verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Padang sudah berjalan namun belum mencapai hasil yang optimal, dalam melaksanakan tugasnya sekretariat dibantu oleh pokja pendataan dan sistem informasi, pokja pengembangan kemitraan dan pokja pengaduan masyarakat. Kemudian implementasi kebijakan pembentukan TKPK Kota Padang terkendala oleh kurangnya pemahaman SKPD terhadap program penanggulangan kemiskinan, kurangnya koordinasi yang terjalin antara sekretariat TKPK Kota Padang dengan SKPD terkait, serta minimnya anggaran untuk melaksanakan kebijakan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala implementasi kebijakan pembentukan TKPK adalah memberikan pemahaman kepada SKPD tentang upaya penanggulangan kemiskinan; menunjuk nama penanggung jawab pengelola pada setiap SKPD; menyepakati jadwal pelaksanaan rapat dan mengadakan rapat-rapat mendadak yang langsung dipimpin oleh ketua TKPK; meningkatkan alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan yang ada pada masing-masing dinas tiap tahunnya dan bekerja sama dengan BAZDA Kota Padang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahrabbiil a’lamiin, Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Implementasi Kebijakan Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Padang**” Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam dengan ilmu pengetahuan yang canggih dan modern seperti sekarang ini.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Ucapan terima kasih terdalam penulis ucapkan untuk Ibunda tercinta Jasmains dan Papa tercinta Suardi, AMa.Pd yang menjadi motivator utama dalam penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Afriva Khaidir, MAPA. Ph.D selaku Dosen Pembimbing I dan kepada Ibu Siska Sasmita, S.IP. MPA selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan, pemikiran, waktu dan berbagai masukan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Juga untuk para dosen penguji yakni Bapak Dr. H. Helmi Hasan, M.Pd, Ibu Dra. Hj. Aina dan Ibu Dra. Hj. Maria Montessori, M.Ed. M.Si, terimakasih telah memberikan masukan-masukan yang sangat berguna bagi skripsi ini.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang secara integratif memiliki andil dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D dan Henni Muchtar, SH, M. Hum. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Drs. Ideal Putra, M.Si selaku Penasehat Akademis.
5. Bapak dan Ibu Dosen pada Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
6. Staf kepastakaan dan staf administrasi Jurusan Ilmu Sosial Politik dan staf administrasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
7. Bapak Kepala Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Padang dan seluruh staf selaku sekretariat TKPK yang telah membantu dalam penelitian ini.
8. Seluruh Staf dan Pegawai SKPD yang terlibat dalam keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Padang.
9. Seluruh keluarga besar yang penulis cintai.
10. Rekan-rekan mahasiswa Ilmu Administrasi Negara khususnya IAN NR 07, terimakasih untuk ide-ide dan semangatnya.

Semoga bantuan yang diberikan pada penulis mendapat Ridho dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dan relevan agar skripsi ini bisa menjadi layak. Akhirnya kepada Allah jualah penulis memohon, semoga skripsi ini memberikan manfaat yang positif untuk para pembaca. Amin.

Padang, Januari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	9
1. Konsep Kebijakan	10
2. Konsep Koordinasi.....	19
3. Konsep Organisasi.....	24
4. Konsep Kemiskinan	36
B. Kerangka Konseptual	44
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Informan Penelitian.....	48
D. Jenis dan Sumber Data	50
E. Teknik dan Pengumpulan Data	51
F. Uji Keabsahan Data.....	53
G. Teknik Analisis Data.....	55
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum.....	57
B. Temuan Khusus.....	66
C. Pembahasan.....	94
 BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	118
 KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Nama Dinas/ Instansi yang terlibat dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan.....	79
Tabel 2	Nama Penanggung Jawab Pengelolaan Program Kemiskinan (TKPK) Dinas Instansi Se-Kota Padang Tahun 2011	92
Tabel 3	Sekolah Sasaran Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Kota Padang Tahun 2011.....	97
Tabel 4	Data Anak Jalanan yang dibina oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang.....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Konseptual.....	46
Gambar 2	Gambar Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Padang	59
Gambar 3	Struktur Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Penelitian

Lampiran 2 Foto Dokumentasi Penelitian

Lampiran 3 Dokumen lainnya

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian dari FIS UNP

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol dan Linmas Kota Padang

Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Padang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Para pendiri negara bangsa kita memiliki komitmen melalui UUD 1945 untuk membentuk negara yang sejahtera. Cita-cita ini tercermin dalam Pembukaan UUD 1945:....”*Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa*”. Selain itu juga tercermin dalam pasal 27, dimana setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tak lupa pula pada pasal 31,33, dan 34 dimana kekayaan alam kita harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat serta fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Kemiskinan merupakan persoalan mendasar yang menjadi fokus utama pemerintah. Kemiskinan menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya seperti tidak terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup (BPS Provinsi Sumbar, 2010: 29). Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai suatu tingkatan kehidupan yang berada di bawah standar kebutuhan hidup minimal yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat berdasarkan atas kebutuhan beras dan kebutuhan gizi (Sajogyo dalam Izza Mafruhah, 2009: 6).

Kota Padang merupakan kota dengan jumlah penduduk paling banyak di Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan data kependudukan tahun 2009, diketahui

jumlah penduduk Kota Padang 875.750 jiwa dengan kepadatan 1.233 jiwa /km² (sumbar.bps.go.id). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Kota Padang pada Maret tahun 2007 mencapai 39,5 ribu jiwa atau sebanyak 4,97 persen dari total penduduk Kota Padang. Namun sayangnya, pada Maret 2008 BPS kembali melansir data terbaru yang justru menunjukkan angka kemiskinan terus bertambah, yakni penduduk miskin berjumlah 51,7 ribu jiwa atau 6,40 persen dari total penduduk Kota Padang. Namun demikian pada Maret tahun 2009 ada kabar cukup menggembirakan karena penduduk miskin sempat menurun menjadi 46,8 ribu atau 5,72 persen dari jumlah total penduduk Kota Padang (BPS, 2009: 27-43). Selanjutnya menurut Walikota Padang Fauzi Bahar jumlah warga miskin di Kota Padang masih tinggi. Setidaknya, hingga November 2010 terdapat sebanyak 29.661 kepala keluarga (KK) miskin yang tersebar pada 11 kecamatan dan 104 kelurahan, sesuai Badan Pusat Statistik 2010 (Harian Singgalang, 30 November 2010).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/ Kota disebutkan pada pasal 1 ayat 1 bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Selain itu dalam peraturan tersebut diatas juga dijelaskan koordinasi penanggulangan kemiskinan sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat 1 bahwa penanggulangan kemiskinan di daerah

diselenggarakan secara terkoordinasi dan pasal 2 ayat 2 koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, serta koordinasi pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah.

Disadari bersama bahwa tanggung jawab pencapaian pengurangan kemiskinan memerlukan peran serta berbagai pelaku pembangunan, termasuk pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah dalam mengidentifikasi permasalahan kemiskinan ditingkat lokal merupakan kunci bagi penentuan kebijakan yang paling tepat dan efektif.

Sementara pemerintah Kota Padang dengan Keputusan Walikota Padang Nomor 01 Tahun 2010 telah membentuk tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Kota Padang yang merupakan pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 dimana pada diktum kedua dijelaskan bahwa Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Padang mempunyai tugas yaitu:

1. mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kota Padang,
2. mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Padang.

Koordinasi merupakan hal penting didalam penanggulangan kemiskinan, dimana koordinasi merupakan proses pemaduan sasaran dan kegiatan dari unit-unit kerja yang terpisah untuk dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif (James AF Stoner). Sedangkan menurut G.R. Terry koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan

mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan (Hasibuan dalam <http://vivitardyansah.blogspot.com> diakses 13 Juni 2011).

Pengkoordinasian merupakan upaya untuk menserasikan kesatuan-kesatuan, pekerjaan-pekerjaan dan orang-orang agar dapat berkerja secara tertib dan seirama menuju kearah tercapainya tujuan tanpa terjadinya kekacauan (*chaos*,) penyimpangan, percekcoakkan dan kekosongan kerja (*Uaccum*), jadi koordinasi dapat dimaknai sebagai proses penyatupaduan sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit lembaga untuk mencapai tujuan lembaga secara efektif dan efisien (<http://farchanbinadnan.blogspot.com/2009/12/koordinasi-manajemen.html> diakses 19 Juni 2011).

Kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Padang tahun 2010 masih ditemukan beberapa permasalahan yakni (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Padang, 2010: 6-7):

1. Belum berfungsinya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang dibentuk secara optimal.
2. Belum dimanfaatkannya dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang ada sebagai acuan program penanggulangan kemiskinan.
3. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, karena satuan kerja perangkat daerah terkait sering tidak menghadiri rapat koordinasi yang dilaksanakan.
4. Belum terintegrasinya pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang ada di Kota Padang.
5. Sering berubahnya struktur organisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
6. Relatif masih kecilnya dana kegiatan untuk kegiatan program penanggulangan kemiskinan (Target 20% dari APBD/ tahun).
7. Belum semua satuan kerja perangkat daerah melaporkan program-program pemberdayaan masyarakatnya kepada TKPKD Kota Padang/ BPMPK Kota Padang selaku ketua pelaksana penanggulangan kemiskinan di Kota Padang.

Salah satu tugas TKPKD Kota Padang adalah menghimpun program penanggulangan kemiskinan di Kota Padang, rekapitulasi program tersebut terlambat penyelesaiannya disebabkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait tidak mengirimkan data yang diminta.

Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Padang seharusnya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal dalam mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dan mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, namun dalam kenyataannya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang belum berfungsi secara maksimal karena Instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terlibat dalam upaya penanggulangan kemiskinan masih bekerja secara parsial atau sendiri-sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas mengenai kebijakan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang, bagaimana implementasinya dan kendala-kendala yang dihadapi, dalam skripsi yang berjudul “**Implementasi Kebijakan Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Padang**”.

B. Identifikasi Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya, penulis mencoba mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

- a. Belum tercapainya pemerataan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Padang.
- b. Penanggulangan kemiskinan masih dilaksanakan secara parsial atau sendiri-sendiri oleh instansi atau satuan kerja perangkat daerah Kota Padang.
- c. Belum maksimalnya pelaksanaan tugas koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan.
- d. Ketimpangan kebijakan publik dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 terhadap penduduk miskin di Kota Padang yang tercermin dalam UUD pasal 27,31,33 dan 34.

2. Batasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini ditujukan kepada implementasi kebijakan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Padang, kendala-kendala dalam implementasi kebijakan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Padang dan upaya untuk mengatasi kendala dalam implementasi kebijakan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Padang.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana implementasi kebijakan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Padang?

- b. Apa saja kendala-kendala dalam implementasi kebijakan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Padang?
- c. Apa saja upaya untuk mengatasi kendala dalam implementasi kebijakan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Padang?

C. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini terfokus dan untuk mempertajam objek pembahasan, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Padang, kendala-kendala dalam implementasi kebijakan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Padang dan upaya untuk mengatasi kendala dalam implementasi kebijakan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Padang.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam implementasi kebijakan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala dalam implementasi kebijakan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Padang.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangsih terhadap ilmu administrasi negara tentang implementasi kebijakan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Padang.
2. Secara praktis, merupakan motivasi atau dorongan kepada Pemerintah agar penerapan implementasi kebijakan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang dapat dilaksanakan secara baik dan maksimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 01 Tahun 2010 dan dilaksanakan dengan Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Kota Padang. Implementasi tersebut dapat dilihat dari beberapa tugas yang dilaksanakan yaitu:
 - a. Pelaksanaan tugas koordinasi dalam hal kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kota Padang, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan cara melakukan rapat koordinasi dengan semua anggota TKPK/ SKPD yaitu satu kali dalam tiga bulan bahkan rapat tersebut dapat berubah sesuai dengan kebutuhan. Namun sayangnya, didalam pelaksanaan rapat koordinasi masih ada SKPD yang tidak menghadirinya.
 - b. Pelaksanaan tugas koordinasi dalam hal pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Padang, TKPK melakukan permintaan atau penyampaian data program penanggulangan kemiskinan melalui laporan realisasi program penanggulangan kemiskinan kepada setiap SKPD, namun didalam penyampaian laporan realisasi program penanggulangan kemiskinan juga masih ada SKPD yang tidak

menyampaikannya kepada sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

- c. Selain itu untuk membantu kelancaran dari pada tugas sekretariat, sekretariat juga berkoordinasi dengan kelompok kerja pendataan dan sistem informasi (BPS), kelompok kerja pengembangan kemitraan (Bappeda) dan kelompok kerja pengaduan masyarakat (BPMPK).
2. Ada beberapa kendala yang ditemukan dalam Implementasi Kebijakan Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Kota Padang, diantaranya adalah kendala dari pelaksana kebijakan (*implementors*) seperti kurangnya pemahaman SKPD terhadap program penanggulangan kemiskinan, kurangnya koordinasi yang terjalin antara sekretariat TKPK dengan SKPD terkait, serta minimnya anggaran untuk melaksanakan kebijakan sehingga kebijakan tersebut kurang terlaksana dengan baik.
 3. Upaya-upaya yang dilakukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Kota Padang dalam mengatasi kendala dalam implementasi kebijakan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan adalah memberikan pemahaman kepada SKPD tentang upaya penanggulangan kemiskinan; menunjuk nama penanggung jawab pengelola pada setiap SKPD; menyepakati jadwal pelaksanaan rapat dan mengadakan rapat-rapat mendadak yang langsung dipimpin oleh ketua TKPK; meningkatkan alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan yang ada pada masing-masing dinas tiap tahunnya dan bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Daerah Kota Padang.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan setelah dilakukan pembahasan dan ditemukan kelemahan-kelemahan dalam Implementasi Kebijakan Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Padang, oleh karena itu saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada setiap SKPD agar dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawabnya sebagai *implementors* untuk mengemban tugas dan tanggung jawabnya didalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Padang.
2. Diharapkan kepada setiap lapisan masyarakat baik dunia usaha maupun lembaga non pemerintah untuk memberikan bantuan dana terhadap pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan agar program-program penanggulangan kemiskinan dapat mencapai target dan sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharmi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Burhan Bungin. 2005. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dwiyanto Indiahono. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ginanjari Kartasasmita. 1997. *Kemiskinan*. Jakarta: Balai Pustaka
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Izza Mafruhah. 2009. *Multidimensi Kemiskinan*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- J. Winardi. 2006. *Teori Organisasi & Pengorganisasiannya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Lexy J. Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Miftah Thoha. 2005. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar & aplikasinya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Nasir. 1988. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muslim Kasim. 2006. *Karakteristik Kemiskinan Di Indonesia & Strategi Penanggulangannya*. Jakarta: Indomedia Global.
- Rahmadani Yusran, dkk. 2006. *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Padang: UNP Press.
- Soetomo. 2008. *Masalah Sosial Dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Solichin Abdul Wahab. 2002. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Yasril Yunus, dkk. 2006. *Organisasi Dan Manajemen*. Padang: UNP Press.